



PENETAPAN

Nomor 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

MUNIROH Binti ALI MUSADDAD, NIK 3507106802740003, tempat/tanggal lahir Malang, 28 Februari 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Dusun Karangasem RT.032 RW.008 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Juni 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juli 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Karangasem RT.032 RW.008 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 30 tahun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. AHMAD DLIYA' UDDIN umur , 27 tahun;
 - b. KAMELIA FIRDIA, umur 26 tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



- c. NUR IZZA SAFIRA umur 18 tahun;
- d. AHMAD ZAROBY umur 14 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : tanggal 07 Juli 1989;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon : MISKIYAH Binti H. ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 17 tahun dan Nama Suami Pemohon : ALI MUNTADHO Bin SURAHMAN tempat, tanggal lahir : Malang, 27 tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : MUNIROH Binti ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Februari 1974 dan Nama Suami Pemohon : ALY MURTADLO Bin SURAHMAN dan tempat, tanggal lahir : Malang, 13 September 1961;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akte kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon : MISKIYAH Binti H. ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 17 tahun dan Nama Suami Pemohon : ALI MUNTADHO Bin SURAHMAN tempat, tanggal lahir : Malang, 27 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 07 Juli 1989 sebenarnya adalah Nama Pemohon : MUNIROH Binti ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Februari 1974 dan Nama Suami Pemohon : ALY MURTADLO Bin SURAHMAN dan tempat, tanggal lahir : Malang, 13 September 1961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507101309610001 tanggal 28-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507106802740003 tanggal 28-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507102209080071 tanggal 20-07-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 176/24/VII/1989 tanggal 07 Juli 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 3507-LT-07112017-008 tanggal 07 November 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon Nomor 3507-KM-18062019-0003 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Surat Keterangan Kelahiran atas nama suami Pemohon yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor 470/413/35.07.10/2004/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gondanglegiwetan, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama suami Pemohon Nomor 470/413/35.07.10/2004/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gondanglegiwetan, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9)
- j. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor B-864/Kua.13.35.24/PW.01/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8, P.9 dan P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama suami Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon tertulis Nama Pemohon : MUNIROH Binti ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Februari 1974 dan Nama Suami Pemohon : ALY MURTADLO Bin SURAHMAN dan tempat, tanggal lahir : Malang, 13 September 1961;;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon : MISKIYAH Binti H. ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 17 tahun dan Nama Suami Pemohon : ALI MUNTADHO Bin SURAHMAN tempat, tanggal lahir :

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, 27 tahun, dan karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.8, P.9 dan P.10) memberi bukti bahwa biodata Pemohon adalah Nama Pemohon : MISKIYAH Binti H. ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 17 tahun dan Nama Suami Pemohon : ALI MUNTADHO Bin SURAHMAN tempat, tanggal lahir : Malang, 27 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 07 Juli 1989 sebenarnya adalah Nama Pemohon : MUNIROH Binti ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Februari 1974 dan Nama Suami Pemohon : ALY MURTADLO Bin SURAHMAN dan tempat, tanggal lahir : Malang, 13 September 1961;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 07 Juli 1989, sebagaimana bukti P.4;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon : MISKIYAH Binti H. ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 17 tahun dan Nama Suami Pemohon : ALI MUNTADHO Bin SURAHMAN tempat, tanggal lahir : Malang, 27 tahun;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah Nama Pemohon : MUNIROH Binti ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Februari 1974 dan Nama Suami Pemohon : ALY MURTADLO Bin SURAHMAN dan tempat, tanggal lahir : Malang, 13 September 1961;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu Nama Pemohon : MISKIYAH Binti H. ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 17 tahun dan Nama Suami Pemohon : ALI MUNTADHO Bin SURAHMAN tempat, tanggal lahir : Malang, 27 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 07 Juli 1989 diubah menjadi Nama Pemohon : MUNIROH Binti ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Februari 1974 dan Nama Suami Pemohon : ALY MURTADLO Bin SURAHMAN dan tempat, tanggal lahir : Malang, 13 September 1961;;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon : MISKIYAH Binti H. ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 17 tahun dan Nama Suami Pemohon : ALI MUNTADHO Bin SURAHMAN tempat, tanggal lahir : Malang, 27 tahun, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 07 Juli 1989 diubah menjadi Nama Pemohon : MUNIROH Binti ALI MUSADDAD tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Februari 1974 dan Nama Suami Pemohon : ALY MURTADLO Bin SURAHMAN dan tempat, tanggal lahir : Malang, 13 September 1961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0818/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)